

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: Tunggakan PBB Rp800 Miliar
Entitas / Cakupan	: Kota Bandung
Sumber / Hal	: Pikiran Rakyat/Hal.3
Edisi	: Senin, 12 November 2018

Tunggakan PBB Rp 800 Miliar

BANDUNG, (PR).-

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat melakukan pemeriksaan terhadap kinerja pengelolaan pajak bumi dan bangunan (PBB) Pemerintah Kota Bandung. Pemeriksaan dilakukan terhadap kinerja pengelolaan PBB tahun anggaran 2017 dan semester I tahun anggaran 2018.

Hasilnya, Pemkot Bandung masih terbebani piutang PBB sebesar Rp 800 miliar. Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat Arman Syifa menuturkan, BPK Perwakilan Jawa Barat akan melakukan asistensi untuk rekomendasi bagi Pemerintah Kota Bandung.

"Agenda utama kami ialah dalam proses pemeriksaan laporan kinerja pengelolaan PBB. Nantinya akan menjadi patokan kami ketika menilai pengelolaan kinerja dan membuat kesimpulan pengelolannya serta rekomendasi perbaikannya," ujar Arman, seusai bertemu dengan Wali Kota Bandung Oded M Danial di Pendopo Kota Bandung, pekan lalu.

BPK Perwakilan Jabar telah melakukan pemeriksaan laporan kinerja pengelolaan PBB

oleh Pemkot Bandung. Pemeriksaan itu menjadi patokan dalam menilai pengelolaan kinerja keuangan.

Piutang PBB hingga Rp 800 miliar itu diakui Oded sebagai salah satu poin yang menjadi bahan evaluasi Pemkot Bandung. Namun, berkat supervisi dari BPKP, jumlah piutang PBB terus turun. "Pak Kepala Perwakilan BPK Jabar menyampaikan *existing* hari ini Kota Bandung bahwa diharapkan ada pergerakan lebih optimal untuk PBB," tutur Oded.

Pajak bumi dan bangunan adalah salah satu mata pajak pendapatan asli daerah (PAD) yang menjadi unggulan Pemkot Bandung. Pendapatan Pemerintah Kota Bandung dari pajak terdiri atas 9 jenis. Selain PBB, ada pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan (PPJ), parkir, air tanah (PAT), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

"Kami akan terus menagih tunggakan PBB dari warga. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung tak akan memberlakukan pemutihan atau penghapusan pajak bagi penunggak PBB. Memang bu-

tuh waktu. Jadi ke depan, di samping terus penagihan, juga yang terpenting ialah memperkuat *database* wajib pajak itu. Kita juga terus berupaya Kota Bandung harus memperkuat sertifikasi," ujarnya.

Selain itu, Pemkot Bandung masih harus memperkuat sertifikasi aset agar dapat memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Jabar. Arman menilai Pemkot Bandung masih harus bekerja ekstra keras untuk membereskan soal aset yang berulang setiap penilaian.

"Kami menyinggung terkait status Kota Bandung yang sampai sekarang ada pengecualian pada laporan keuangannya hingga tahun lalu. Satu hal yang dibicarakan adalah mengenai aset. Kami mengapresiasi apa yang telah dilakukan Pemkot Bandung tahun lalu. Walaupun, kami akui perlu ada percepatan lagi untuk bisa sampai menghilangkan adanya pengecualian tersebut, terutama pengelolaan tanah dan pengelolaan bangunan milik Pemkot," ujar Arman. (Muhammad Fikry Mauludy)***